



Analisis jejaring pengurangan risiko di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Slamet

Agus Setio Widodo *

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal. Jalan Halmahera Km. 1, Kota Tegal, Jawa Tengah, 53121 Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: dosen_muda@yahoo.co.id , Telp: +628156559044

Abstract

Simple observation of events for the disaster in Indonesia is almost always showed the same picture is a condition in which reactive attitude and spontaneous, unplanned as shown by society and government. There is a general tendency that people do not know how to act or addressing disaster. Regional preparedness in the face of natural disasters is very important. Slamet mountain with an altitude of 3,428 meters above sea level is the highest mountain in Central Java and the second highest in Java. Population data in the area of Mount Slamet and surrounding areas are included in Kawasan Rawan Bencana (disaster-prone areas) is approximately 215 953 inhabitants. Seeing the extent of the area affected by the eruption of Mount Slamet threats can not be taken lightly. This study aimed to explore the networking model for effective disaster risk reduction in disaster-prone areas of Mount Slamet. Networking model for disaster risk reduction is a very important information in order to overcome the impact of the eruption of Mount Slamet.

Keyword: Disaster risk education; networking model; mount Slamet

Abstrak

Pengamatan sederhana terhadap kebencanaan di Indonesia hampir selalu menunjukkan gambaran yang sama yaitu suatu sikap reaktif dan spontan, tidak terencana seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah. Ada kecenderungan umum bahwa orang tidak tahu bagaimana harus bertindak atau menangani bencana. Kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam sangat penting. Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Jawa. Data kependudukan di kawasan Gunung Slamet dan sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) adalah sekitar 215 953 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model jaringan untuk pengurangan risiko bencana yang efektif di daerah rawan bencana Gunung Slamet. Model untuk pengurangan risiko bencana adalah informasi yang sangat penting dalam rangka mengatasi dampak letusan Gunung Slamet

Kata Kunci: pengurangan, risiko, jejaring aktor, gunung Slamet

PENDAHULUAN

Bencana bukanlah sebuah fenomena baru umat manusia (Kusumasari, 2014: 1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006)

Menurut Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Secara geografis, posisi Indonesia sangat rentan terhadap dampak letusan gunung berapi dan gempa bumi. Berdasarkan sejarah kebencanaan, diketahui hampir semua bencana alam besar yang pernah terjadi di dunia, sebagian di antaranya terjadi di Indonesia (Kusumasari, 2013: 75). Bencana alam yang terjadi di Indonesia pada umumnya telah menimbulkan korban jiwa maupun materi yang tidak sedikit.

Khusus bencana letusan (erupsi) gunung berapi, selama tahun 2014 Indonesia diguncang sejumlah letusan gunung berapi yang menelan puluhan korban jiwa dan menyengsarakan ratusan ribu warga. BNPB (2014) mencatat

sepanjang tahun 2014 telah terjadi 5 kejadian bencana erupsi gunung api di Indonesia, yaitu Erupsi Gunung Sinabung (13-9-2013 hingga sekarang), Gunung Kelud (13-2-2014), Gunung Sangeangapi (30-5-2014), Gunung Slamet (13-9-2014), dan Gunung Gamalama (18-12-2014). Total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak (BNPB, 2014). Betapa besarnya dampak bencana alam di Indonesia telah menciptakan “ruang terbuka” untuk sebuah kajian kebencanaan dalam rangka mengurangi dampak atau resiko bencana.

Kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam menjadi sangat penting. Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut (dpl) merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta tertinggi kedua di Pulau Jawa. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Data pada pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang (2015) menyebutkan setidaknya terdapat 2 (dua) macam potensi ancaman bencana kegunungapian yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Gunung Slamet, yaitu ancaman primer dan ancaman sekunder. Potensi ancaman primer merupakan letusan gunung api tipe stromboli yang mencapai radius 10 kilometer dari puncak berupa material batuan kerikil dan awan panas. Adapun potensi ancaman sekunder yaitu ancaman hujan abu yang menyelimuti radius puluhan kilometer dari puncak dan turunnya lahar dingin pasca letusan pada

sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Slamet.

Pihak PVMKG (Pusat Vulkanologi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) melalui pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Pemalang telah membuat Peta Daerah Bahaya atau Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB). Peta Daerah Bahaya Gunung Slamet dibagi menjadi 2 zona, yaitu Daerah Bahaya (Kawasan Rawan Bencana II) dan Daerah Waspada (Kawasan Rawan Bencana I).

Kawasan Rawan Bencana II (Daerah Bahaya) adalah daerah yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya, sehingga kemungkinan akan terlanda oleh bahaya langsung, berupa luncuran awan panas, aliran lava dan lontaran piroklastik serta lahar hujan. Kawasan Rawan Bencana I (Daerah Waspada) adalah kawasan yang letaknya lebih jauh dari sumber bahaya. Daerah ini mungkin akan terlanda hujan abu, pasir dan lapili.

Melihat luasnya wilayah terdampak maka ancaman bencana letusan Gunung Slamet tidak bisa dianggap ringan. Data kependudukan di daerah Gunung Slamet dan sekitarnya yang termasuk kedalam daerah KRB (kawasan rawan bencana) I dan KRB (kawasan rawan bencana) II dihuni oleh sekitar 215.953 jiwa (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2014). Jumlah penduduk ini tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas dan Pemalang.

Bencana alam tidak mungkin diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, apalagi yang bersifat lintas wilayah. Potensi jatuhnya korban jiwa maupun materil akan cukup besar apabila tidak ada upaya pengurangan resiko bencana yang efektif. Namun demikian dalam praktiknya

terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan risiko bencana. Ada indikasi interaksi antar aktor yang tidak selamanya sejalan karena banyaknya kepentingan dan konflik dalam penanganan bencana.

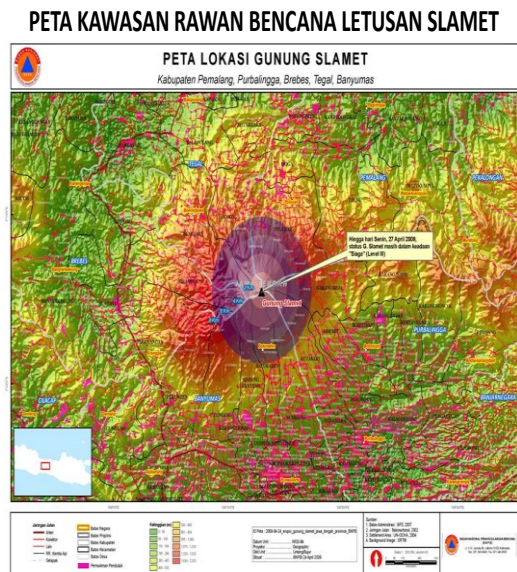
Besarnya dampak bencana alam di Indonesia telah menciptakan “ruang terbuka” untuk sebuah kajian kebencanaan dalam rangka mengurangi dampak atau risiko bencana

Dalam sebuah kajian tentang risiko bencana berjudul *Evaluating Local Government Emergency Management Programs: What Framework Should Public Managers Adopt* sebagaimana dimuat dalam *Public Administration Review* Vol. 70, No. 2 (March | April 2010), pp. 236-246 McEntire, David A dan Gregg Dawson pernah mengatakan : *Bye its very nature, emergency management requires the integration of policies, program, and operations, among a variety of individuals and entities. In the one hand, participation of diverse actors ensure access to significant knowledge, resources and skills. On the other hand, this diversity may complicate or even hinder mitigations, preparedness, response and recovery effort.*”

Mc Entire et.al menilai bahwa penge-lolaan bencana membutuhkan keter-paduan kebijakan, program dan pelaksanaan yang melibatkan banyak individu maupun kelompok. Pada satu sisi keterlibatan aktor dibutuhkan untuk menjamin akses terhadap sumber daya, *skill* maupun pengetahuan. Namun pada sisi yang lain keterlibatan berbagai aktor dengan aneka latar belakang ini justru dapat mempersulit upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respon maupun upaya pemulihan pasca bencana.

METODE

Penelitian dilakukan di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet di 5 Kabupaten yaitu Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas dan Purbalingga. Secara visual lokasi penelitian ini dapat dicermati dari gambar dibawah.



Gambar KRB Gunung Slamet

Alasan memilih 5 (lima) wilayah itu berdasarkan pertimbangan:

1. Jumlah penduduk yang menghuni kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet adalah sekitar 215.953 jiwa (sumber: PVMKG, 2015), tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas dan Pemalang. Sebuah ukuran jumlah penduduk yang besar apabila sampai terjadi korban jiwa akibat buruknya pengurangan risiko bencana.
2. Adanya Forum Slamet yang merupakan forum bersama dalam rangka pengurangan risiko bencana Gunung Slamet yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat di 5 kabupaten Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas dan Pemalang.

3. Kegiatan pengurangan risiko bencana sudah mulai dirintis oleh berbagai aktor dari 5 (lima) wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas dan Purbalingga sejak tahun 2010

Adapun waktu pengambilan data dilakukan selama tiga bulan, yakni pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi tentang berbagai aktor yang terlibat dalam pengurangan risiko di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet.

Dalam melaksanakan Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Cresswell (2009) menyatakan bahwa *qualitative research is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm*. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami problematika manusia dan sosial yang sangat kompleks, untuk medeskripsikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap serta detail yang berasal dari informan pada keadaan yang alami apa adanya.

Untuk menghindari subyektifitas, maka data yang diperoleh dari informan disaring melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Norman K. Denzin(1970)mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Metode triangulasi mengharuskan agar data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*). Untuk

itu maka informan penelitian ini dibagi kedalam dua kelompok, yaitu informan utama dan informan triangulasi sebagai kelompok pemeriksaan silang. Informan utama adalah informan kunci yang dianggap memahami, dan terlibat langsung dalam pengurangan risiko bencana Gunung Slamet, yaitu Ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di kabupaten Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pemalang dan Brebes. Namun demikian pada tulisan ini sendiri data lebih banyak didapatkan dari sumber data sekunder yaitu telaah literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan (Twigg, 2007).

Hasil penelitian berikut akan memberikan deskripsi tentang dinamika jejaring aktor dalam kegiatan pengurangan risiko di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet.

Data pada pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang (2015) menyebutkan setidaknya terdapat 2 (dua) macam potensi ancaman bencana kegunungapian yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Gunung Slamet, yaitu ancaman primer dan ancaman sekunder. Potensi ancaman primer merupakan letusan gunung api tipe stromboli yang mencapai radius 10 kilometer dari puncak berupa material

batuan kerikil dan awan panas. Adapun potensi ancaman sekunder yaitu ancaman hujan abu yang menyelimuti radius puluhan kilometer dari puncak dan turunnya lahar dingin pasca letusan pada sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Slamet.

Pihak PVMKG (Pusat Vulkanologi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) melalui pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Pemalang telah membuat Peta Daerah Bahaya atau Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB). Peta Daerah Bahaya Gunung Slamet dibagi menjadi 2 zona, yaitu Daerah Bahaya (Kawasan Rawan Bencana II) dan Daerah Waspada (Kawasan Rawan Bencana I).

Kawasan Rawan Bencana II (Daerah Bahaya) adalah daerah yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya, sehingga kemungkinan akan terlanda oleh bahaya langsung, berupa luncuran awan panas, aliran lava dan lontaran piroklastik serta lahar hujan. Kawasan Rawan Bencana I (Daerah Waspada) adalah kawasan yang letaknya lebih jauh dari sumber bahaya. Daerah ini mungkin akan terlanda hujan abu, pasir dan lapili.

Melihat luasnya wilayah terdampak maka ancaman bencana letusan Gunung Slamet tidak bisa dianggap ringan. Data kependudukan di daerah Gunung Slamet dan sekitarnya yang termasuk kedalam daerah KRB (kawasan rawan bencana) I dan KRB (kawasan rawan bencana) II dihuni oleh sekitar 215.953 jiwa (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2014). Jumlah penduduk ini tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas dan Pemalang.

Bencana alam tidak mungkin diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, apalagi

yang bersifat lintas wilayah. Potensi jatuhnya korban jiwa maupun materil akan cukup besar apabila tidak ada upaya pengurangan resiko bencana yang efektif. Namun demikian dalam praktiknya terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan resiko bencana. Ada indikasi interaksi antar aktor yang tidak selamanya sejalan karena banyaknya kepentingan dan konflik dalam penanganan bencana.

Pola interaksi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana di Gunung Slamet terbentuk berdasarkan tingkat keberlangsungannya. Setiap aktor yang berbeda mempunyai persepsinya sendiri mengenai permasalahan. Sebuah jaringan adalah sekumpulan kompleksitas yang menggambarkan pemetaan hubungan yang tidak hanya menyangkut atribut tetapi juga aliran antar individu.

Berbagai aktor yang terlobat dalam pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana Gunung Slamet antara lain Ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di kabupaten Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pemalang dan Brebes. Adapula sebuah forum yang *concern* dengan permasalahan bencana Gunung Slamet yaitu Forum Slamet. Forum ini terdiri dari keanggotaan BPBD, unsur SKPD dan masyarakat umum termasuk jurnalistik untuk bersama-sama *share* dan bersiap dalam rangka pengurangan risiko bencana Gunung Slamet.

Beberapa kasus yang menjadi indikasi lemahnya pengelolaan risiko bencana di kawasan Gunung Slamet antara lain Pertama; Lemahnya koordinasi antara BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kedua; Kurangnya koordinasi antar kepala daerah maupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan bencana. Contohnya dalam kasus erupsi Gunung Slamet tahun 2014 ternyata para bupati maupun aktor dari Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang tidak memiliki koordinasi yang baik dalam pengelolaan risiko bencana. Padahal wilayahnya termasuk dalam kawasan rawan bencana Gunung Slamet (Okezone, Rabu, 21 Januari 2015).

Ketiga; Kurangnya alokasi dana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran bencana yang minim dalam APBN maupun APBD. Idealnya anggaran bencana adalah 1 persen dari total APBN atau APBD (BNPB, 2014). Namun selama ini anggaran bencana hanya 0,02-0,03 persen dari total APBN atau APBD per tahun (cnnindonesia.com, 15/12/2014). Dengan prosentase anggaran seperti itu, sulit bagi pemerintah daerah menangani bencana yang kerap terjadi.

Berbagai aktor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana Gunung Slamet sangat berpotensi menimbulkan gesekan konflik kepentingan. Apalagi dana tanggap bencana merupakan sesuatu yang sangat rawan untuk disalahgunakan. Dalam kenyataannya interaksi antar aktor itu belum memunculkan model yang representatif untuk pengurangan risiko bencana.

Pembahasan

Studi jejaring menguji serangkaian obyek yang saling terkait atau aktor dengan tujuan analisis sebagai kolektifitas sosial terbatas walaupun

dalam prakteknya batasan jaringan seringkali tidak ada atau ambigu (Riyanto, 2013:56).

Dalam ilmu sosial, istilah *networks* pertama kali dipakai pada tahun 1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan, kesalingterkaitan dan dependensi personal. Kata *networks* mengandung dua arti yaitu pertama, berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer yakni komputer yang saling berhubungan (Parson, 2011:186-187). Selanjutnya Klijn (1999:30) menjelaskan *networks* dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Klijn menge-mukakan *networks* sebagai kluster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Aldrich dan Watten lebih melihat *networks* sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti.

Dalam konteks kebencanaan, apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosio-ekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai *common and public problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik.

Dalam jaringan aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor (*open system*). Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik

karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi *policy makers*. Kebijakan manajemen bencana sendiri pasti berkaitan dengan banyak aktor.

Penelitian ini mencoba melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik kajian menyangkut jejaring aktor dan manajemen bencana dalam konteks administrasi publik. Berbagai penelitian terdahulu itu penulis pilih untuk menambah pemahaman dan perbandingan serta referensi.

Ana Campos G., Niels Holm-Nielsen, Carolina Díaz G., Diana M. Rubiano V., Carlos R. Costa P., Fernando Ramírez C. and Eric Dickson. 2011, *Analysis of Disaster Risk Management: A Contribution to the Creation of Public Policies*. The World Bank Columbia dan GFDRR (*Global Facility for Disaster Reduction and Recovery*). Fokus penelitian diarahkan pada variabel: 1) Peran Administrasi Territorial dalam manajemen Bencana, 2). Peran Administrasi Sektoral dalam Manajemen Bencana dan 3). Tanggung-jawab Sektor Publik dan Privat dalam manajemen Bencana. Penelitian yang dilakukan di Kolumbia ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1). Kemajuan konseptual yang menjelaskan hubungan antara manajemen bencana dan pembangunan belum tercapai pada level kebijakan, apalagi menyatu sebagai bagian integral dari administrasi publik 2). Risiko bencana semakin bertambah di wilayah perkotaan dan perdesaan seiring dengan minimnya pelaksanaan, monitoring dari perangkat dan pelaksana perencanaan kebijakan dan buruknya manajemen pengairan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka sama - sama mengkaji manajemen risiko bencana dalam konteks administrasi publik. Perbedaannya terletak pada pendekatan teoritik dimana Ana Campos et.al lebih menyoroti pada aspek pembuatan kebijakan publik dan peran administrator, sedangkan peneliti akan melihatnya dengan pendekatan teori jejaring aktor dikaitkan dalam pengurangan risiko bencana. Perbedaan lainnya adalah kalau pada penelitian terdahulu hanya menyoroti peran administrator maka penelitian ini akan meneliti relasi dan peran para aktor yang beraneka ragam dalam pengurangan risiko bencana.

Pavita Wulan Andadari, Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Vol. 1 Nomor 8 tahun 2011, *Kerjasama Antar Aktor Dalam Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Kelud (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)*. Penulis meyakini bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU No. 27 Tahun 2007). Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi adalah adanya orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang umumnya disebut pengungsi. Hasil dari riset ini ternyata Pemerintah tidak dapat berperan secara tunggal oleh sebab itu diperlukan keterlibatan aktor Non-pemerintahaktor dan masyarakat untuk melakukan kerjasama. Rumusan masalah

diantaranya mengenai aktor yang terlibat serta perannya, bentuk kerjasama dan faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama antar aktor dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Kelud. Pemerintah (BPBD Kabupaten Malang) sebagai aktor pengambil keputusan, aktor swasta (PT. Semen Indonesia) sebagai fasilitator pemberi bantuan logistik kebutuhan di pengungsian dan Masyarakat berperan sebagai partisipator. Penanganan terhadap dampak ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat serta pengurangan rumor yang timbul pada saat kondisi darurat dapat menjadi perhatian penting untuk para pembuat sekaligus pengambil keputusan untuk membangun mekanisme penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terpadu, efektif dan efisien.

Menurut Smith (2007), ada dua konsep paradigma yang digunakan dalam penelitian bencana dari perspektif ilmu sosial, yaitu paradigma perilaku dan paradigma struktural. Paradigma perilaku menekankan pada penyebab geografis dari bencana dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh dampak bencana. Paradigma perilaku kurang memperhatikan keadaan sosial daerah yang dilanda bencana. Sebaliknya, paradigma struktural menekankan pada pengaruh struktur sosial tempat melekatnya individu dan kelompok (Bolin, 1998, Smith, 2007) serta mengakui bahwa bencana adalah pengaruh alam atau masyarakat yang mengintensifkan masalah kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari (Hutton dan Haque, 2004). Namun terlepas dari apapun paradigm yang digunakan dalam memahami terjadinya bencana, dampak sosial yang

akan ditimbulkannya tidaklah ringan. Berpijak pada kenyataan demikian maka sebagai sebuah kondisi ideal, konsep manajemen bencana yang baik perlu untuk segera dibangun.

Dalam kasus pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana Gunung Slamet setidaknya ada aktor dari unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Keberadaan sebuah forum bersama yang disebut sebagai forum Slamet semestinya dapat menjadi “jembatan” bersama untuk mengelola bencana. Namun berbagai konflik kepentingan terjadi sehingga menyebabkan pengurangan risiko bencana itu lemah.

Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. Konflik antar aktor dalam pengurangan risiko bencana Gunung Slamet berkaitan dengan jumlah anggaran yang terlalu kecil dan koordinasi lintas administratif antar kabupaten yang masih lemah.

Berbagai indikasi lemahnya pengurangan risiko bencana oleh berbagai aktor di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet ini menjadi bukti (*evidence*) belum optimalnya pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Apabila diperhatikan dari berbagai kasus lemahnya pengelolaan bencana, maka dapat dikatakan bahwa kita masih belum siap menghadapi kejadian-kejadian bencana berskala besar maupun menengah.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya, tingginya berbagai upaya atau rekayasa teknis yang diarahkan untuk melemahkan

bahaya alam tersebut ternyata tidak secara otomatis terbukti dapat memberikan pengaruh positif terhadap terselamatkannya manusia dari kerugian bencana yang menjadi orientasi dari manajemen penanggulangan bencana. Disinilah kita meyakini bahwa dalam penanggulangan bencana alam tetap saja ada konsekuensi negatif yang harus ditanggung.

Penting untuk diingat bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Sudah memberi pedoman dasar yang mengatur wewenang, hak, kewajiban dan sanksi bagi segenap penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana. Menurut UU No.24 2007 tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: (a) kesiapsiagaan (b) peringatan dini dan (c) mitigasi bencana.

Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana yang dapat dilakukan melalui (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat (e) penyiapan lokasi evakuasi (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Mengingat begitu banyak gunungapi yang ada di wilayah Indonesia dan padatnya penduduk yang bermukim di

sekitarnya maka bencana erupsi gunungapi dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan tugas dan fungsinya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi termasuk BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi) sebagai salah satu unitnya turut berperan dalam manajemen krisis bencana erupsi. Pada fase Prakejadian peranannya dapat meliputi langkah - langkah penilaian risiko bencana, pemetaan daerah kawasan rawan bencana, pembuatan peta risiko dan membuat simulasi skenario bencana. Tindakan lain yang perlu dilakukan adalah pemantauan gunungapi dan menyusun rencana keadaan darurat. Adapun pada saat fase kritis maka sudah harus dilakukan tindakan operasional berupa pemberian peringatan dini, meningkatkan komunikasi dan prosedur pemberian informasi, menyusun rencana tanggap darurat yang berupa penerapan dari tindakan rencana keadaan darurat dan sesegera mungkin mendefinisikan perkiraan akhir dari fase kritis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuk jaringan aktor dari kegiatan pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana Gunung Slamet, yaitu Forum Slamet. Jaringan aktor terdiri dari aktor yang relatif sama namun aktor tersebut bersifat dinamis sehingga kadangkala bersama dalam satu jaringan kerja dan di era yang lain berada di jaringan kerja lainnya. Forum Slamet sebagai sebuah jaringan aktor merupakan elaborasi dari aktor-aktor pemerintah, swasta maupun masyarakat yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana

Gunung Slamet. Jaringan kerja aktor menghasilkan kekuatan, semakin besar jaringan terbentuk baik dari kualitas maupun kuantitas maka semakin besar pula kekuatan yang dihasilkannya dan mampu menciptakan pengurangan risiko bencana yang efektif di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Slamet.

Rekomendasi

Efektifitas pengurangan risiko bencana ditentukan oleh banyak faktor maupun aktor. Untuk itu ke depan perlu adanya sebuah kajian atau riset yang tidak hanya meneliti tentang konstruksi aktor tetapi juga berbagai alasan yang melatarbelakangi keterlibatan atau ketidakterlibatan aktor dalam pengurangan risiko bencana, dan juga meneliti model jejaring aktor yang terbentuk. Selain itu berbagai diskusi dan pemikiran yang melatarbelakangi munculnya *statement* tentang faktor penentu keberhasilan manajemen bencana secara luas sangatlah penting untuk diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Campos G., Niels Holm-Nielsen, Carolina Díaz G., Diana M. Rubiano V., Carlos R. Costa P., Fernando Ramírez C. and Eric Dickson. 2011. *Analysis of Disaster Risk Management: A Contribution to the Creation of Public Policies*. The World Bank Columbia dan GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery)
- APEKSI. 2008. *Model Kerjasama Antar Daerah*. Laporan Akhir APEKSI dan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

- Creswell. John. W. 2009. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara lima pendekatan (edisi 3)* Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Creswell. John. W. 2009. *Research Design (Third Edition): Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. University of Nebraska, Lincoln. Sage
- Denzin, Norman K. 1970. *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Aldine Publishing Company. Chicago
- Domai, Tjahjanulin (2010) *Kebijakan Kerjasama Antardaerah: Perspektif Sound Governance*. Jenggala Pustaka Utama. Surabaya,
- Frank, Flo & Anne Smith. *The Partnership Handbook*. Minister of Public and Government Services, Canada, 2000.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Ramli, Soehatman. 2011. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Danhas, Mardayeli. 2011. *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Sumatera Barat*. Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang
- Majalah Gema BNPB, 2012. Fokus Berita, *Visi, Komitmen dan kemiteraan dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, (Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana) ISSN 2088-6527 Edisi Agustus 2012 Vol. 3 No. 2

PROFIL SINGKAT

Penulis bernama Agus Setio Widdodo, kelahiran Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Agustus 1974. Penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pancasakti Tegal dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Selain mengajar penulis aktif sebagai peneliti khususnya dibidang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.